Vol. 2, No. 2, Tahun 2025
e-ISSN : 3089-8907
p-ISSN : xxxx-xxxx

Penguatan Sumber Daya Manusia Pertahanan dalam Menghadapi Radikalisme, Konservatisme, dan Liberalisme Agama terhadap Ideologi Pancasila di Indonesia

Rahmat Effendi[1] dan Makmur Rizka[2]
[1]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, rahmateffendiyessa97@gmail.com
[2]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, makmurrizka@yahoo.com

ABSTRAK

Ancaman non-militer terhadap pertahanan nasional Indonesia semakin kompleks seiring berkembangnya radikalisme, konservatisme, dan liberalisme agama yang berpotensi melemahkan kohesi sosial serta mengikis Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga spektrum ancaman ideologis tersebut bekerja melalui narasi keagamaan, ruang digital, jaringan sosial, dan dinamika politik, sehingga menuntut respons pertahanan yang tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga ideologis dan kultural. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik ancaman ideologis berbasis agama terhadap Pancasila serta merumuskan strategi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan dalam menjaga ketahanan ideologi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, melalui penelaahan regulasi pertahanan negara, kebijakan kontra-radikalisasi, dokumen resmi pemerintah, serta literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal akademik nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radikalisme agama mendorong eksklusivisme dan legitimasi kekerasan, konservatisme agama melahirkan rigiditas dan resistensi terhadap nilai kebangsaan, sementara liberalisme agama berpotensi merelatifkan nilai kolektif dan melemahkan konsensus ideologis. Dalam konteks tersebut, SDM pertahanan memiliki peran strategis sebagai garda ideologis melalui kombinasi pendekatan *hard power* dan *soft power*, termasuk pendidikan ideologi, literasi digital, kontra-narasi, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan menawarkan model konseptual penguatan SDM pertahanan dalam menjaga Pancasila, serta secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan pertahanan non-militer berbasis ideologi di Indonesia.

Kata Kunci**:** Sumber Daya Manusia Pertahanan; Radikalisme Agama; Konservatisme Agama; Liberalisme Agama; Pancasila.

ABSTRACT

Non-military threats to Indonesia's national defense are increasingly complex, as the growth of radicalism, conservatism, and religious liberalism has the potential to weaken social cohesion and erode Pancasila as the state ideology. These three spectrums of ideological threats operate through religious narratives, digital spaces, social networks, and political dynamics, thus demanding a defense response that is not only coercive but also ideological and cultural. This study aims to analyze the characteristics of religious-based ideological threats to Pancasila and formulate strategies for strengthening defense human resources (HR) in maintaining national ideological resilience. This study uses a qualitative approach, drawing on national defense regulations, counter-radicalization policies, official government documents, and academic literature, including books and articles from relevant national and international scholarly journals. The results show that religious radicalism encourages exclusivism and the legitimacy of violence, and religious conservatism breeds rigidity and resistance to national values. In contrast, religious liberalism has the potential to relativize collective values and weaken ideological consensus. In this context, defense human resources play a strategic role as an ideological vanguard through a combination of hard and soft power approaches, including ideological education, digital literacy, counter-narratives, and collaboration with civil society. This research contributes theoretically by offering a conceptual model to strengthen defense human resources in upholding Pancasila, and practically by providing policy recommendations to enhance ideology-based non-military defense in Indonesia.

Keywords*:* Defense Human Resources; Religious Radicalism; Religious Conservatism; Religious Liberalism; Pancasila.

PENDAHULUAN

Pertahanan nasional dewasa ini tidak hanya dihadapkan pada ancaman militer konvensional, melainkan juga ancaman non-militer yang bersifat ideologis dan kultural. Salah satu bentuk ancaman

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

non-militer yang semakin menonjol adalah infiltrasi paham keagamaan yang ekstrem, baik dalam wujud radikalisme, konservatisme, maupun liberalisme agama. Radikalisme agama dengan pola pikir eksklusif dan intoleran berpotensi mendegradasi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, konservatisme agama yang rigid sering menimbulkan resistensi terhadap modernisasi kebijakan kebangsaan. Sedangkan liberalisme agama memiliki potensi merelatifkan nilai-nilai nasional yang dapat mengikis konsensus ideologis (Azra, 2016; Bourchier, 2019). Kondisi ini menempatkan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan sebagai aspek strategis dalam menjaga ketahanan ideologi bangsa.

Studi sebelumnya telah membahas radikalisme agama di Indonesia, namun sebagian besar masih berfokus pada keamanan internal atau upaya deradikalisasi pada masyarakat sipil (Sterkens & Hadiwitanto, 2016). Kajian yang secara langsung menghubungkan ancaman ideologis berbasis agama dengan kapasitas SDM pertahanan dalam mempertahankan Pancasila masih relatif terbatas. Hal ini penting diperhatikan mengingat SDM pertahanan bukan hanya aparat militer, tetapi juga aktor sipil yang terlibat dalam ekosistem pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa pertahanan negara bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Dengan demikian, pembangunan SDM pertahanan menjadi krusial dalam membentuk ketahanan ideologi Pancasila di tengah kompleksitas ancaman kontemporer (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 2002).

Sejumlah literatur memperkuat urgensi tersebut. Croissant dan Lorenz menjelaskan bahwa ketahanan demokrasi di kawasan Asia sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara mengendalikan ekstremisme melalui instrumen pendidikan dan pertahanan (Croissant & Lorenz, 2018). Temuan ini relevan bagi konteks Indonesia karena memperlihatkan bahwa ancaman ideologis tidak dapat dipisahkan dari kesiapan SDM pertahanan. Demikian pula, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya pendekatan *soft power* seperti pendidikan kebangsaan, literasi digital, dan kontra-radikalisasi sebagai bagian dari strategi nasional mengatasi ekstremisme (Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024, 2021; Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 Tentang Kontra Radikalisasi, 2025). Namun temuan-temuan tersebut belum secara spesifik menempatkan SDM pertahanan sebagai garda terdepan dalam menghadapi radikalisme, konservatisme, dan liberalisme agama yang berdampak terhadap Pancasila.

Fenomena intoleransi dan radikalisme keagamaan yang dilaporkan Setara Institute serta menguatnya konservatisme dalam wacana politik domestik menunjukkan adanya dinamika ideologis yang mampu melemahkan konsensus kebangsaan (Yosarie & Hasan, 2025; Bruinessen, 2013). Di sisi lain, liberalisme agama yang berkembang di beberapa kalangan menunjukkan kecenderungan relativisasi nilai yang dapat menantang fungsi Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian komprehensif mengenai bagaimana SDM pertahanan dapat diperkuat untuk menjaga dasar ideologi negara.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik ancaman ideologis berbasis agama terhadap Pancasila sebagai dasar negara?
2. Bagaimana strategi penguatan SDM pertahanan dalam menjawab ancaman tersebut?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ancaman radikalisme, konservatisme, dan liberalisme agama terhadap Pancasila, serta merumuskan strategi pengembangan SDM pertahanan yang relevan dalam menjaga pertahanan nasional dari aspek ideologi. Hal ini sejalan dengan pandangan Huntington bahwa kekuatan militer modern tidak hanya diukur dari persenjataan, melainkan juga dari kapasitas ideologis yang menopang stabilitas negara (Huntington, 1957).

Kontribusi artikel ini terbagi ke dalam dua aspek. *Pertama*, kontribusi teoretisnya adalah menawarkan kerangka konseptual mengenai posisi dan peran SDM pertahanan sebagai garda ideologis bangsa dalam menghadapi ancaman ideologis

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

keagamaan. *Kedua*, kontribusi praktisnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Pertahanan, BNPT, dan institusi terkait dalam merancang strategi penguatan ideologi Pancasila melalui pendidikan, literasi digital, pembinaan nilai kebangsaan, serta peningkatan kapasitas SDM pertahanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian terkait hubungan antara ancaman ideologis keagamaan dan peran strategis SDM pertahanan, serta memperluas diskursus mengenai pertahanan non-militer di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual dan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa secara komprehensif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual dan normatif mengenai peran Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan dalam menghadapi ancaman ideologis berupa radikalisme, konservatisme, dan liberalisme agama. Data primer diperoleh dari regulasi hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dokumen resmi Kementerian Pertahanan, serta strategi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan penelitian yang membahas isu radikalisme, ketahanan ideologi, dan Pancasila.

Proses analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Tahap pertama adalah inventarisasi literatur terkait konsep SDM pertahanan, ancaman ideologis keagamaan, dan peran Pancasila dalam pertahanan nasional. Tahap kedua adalah kategorisasi literatur berdasarkan tema untuk memetakan keterkaitan antarvariabel, yaitu SDM pertahanan, ancaman ideologi, dan ideologi Pancasila. Tahap ketiga adalah analisis sintesis, yaitu menarik benang merah dari berbagai literatur untuk menemukan argumentasi konseptual yang utuh. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks global (ancaman transnasional dan digital) serta konteks domestik (politik kebangsaan dan dinamika keagamaan).

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual dan normatif, bukan untuk menguji hipotesis empiris. Dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini dapat memberikan kerangka konseptual mengenai pentingnya penguatan SDM pertahanan berbasis Pancasila sebagai garda ideologi bangsa. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana literatur yang ada mampu menjawab tantangan kontemporer sekaligus mengidentifikasi *gap* yang masih terbuka untuk penelitian lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia Pertahanan dalam Konsep

Konsep Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan merupakan salah satu aspek vital dalam sistem pertahanan negara. Menurut *White Paper on Indonesia's Defense 2015* yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan, SDM pertahanan mencakup seluruh komponen bangsa, baik militer maupun sipil, yang berperan aktif dalam mendukung sistem pertahanan semesta (*Defence White Paper*, 2015). Dalam perspektif akademik, SDM pertahanan tidak hanya menuntut kesiapan fisik dan kemampuan teknis, tetapi juga kompetensi ideologis dan nilai kebangsaan yang menjadi fondasi pertahanan non-militer (Subagyo, 2015). Hal ini sejalan dengan pemikiran Booth bahwa dalam era kontemporer, pertahanan tidak dapat dipisahkan dari aspek identitas, nilai, dan legitimasi politik (Booth, 2007). Dengan demikian, pembangunan SDM pertahanan di Indonesia harus memadukan kekuatan militer, sipil, dan ideologi.

Ancaman radikalisme agama telah menjadi fokus kajian yang luas dalam literatur akademik. Penelitian yang dilakukan oleh Noorhaidi Hasan menunjukkan bahwa radikalisme di Indonesia muncul dari interaksi antara globalisasi Islamisme transnasional dengan dinamika politik domestik (Hasan, 2006). Radikalisme agama ditandai oleh eksklusivisme, intoleransi, serta legitimasi kekerasan atas nama agama yang berpotensi mengancam integritas NKRI. Selain radikalisme, konservatisme agama juga mendapat sorotan penting. Martin van Bruinessen menggambarkan fenomena "*conservative turn*" dalam Islam

Indonesia sebagai pergeseran wacana keagamaan

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

ke arah rigiditas moral dan penekanan pada norma-norma sosial yang ketat (Bruinessen, 2013). Sementara itu, liberalisme agama, sebagaimana dicatat oleh Charles Kurzman, berupaya menginterpretasi agama secara progresif dan pluralis, tetapi dalam konteks Indonesia kerap menimbulkan fragmentasi nilai yang menantang konsensus ideologi kebangsaan (Kurzman & Kurzman, 1998). Ketiga fenomena ini, yaitu radikalisme, konservatisme, dan liberalisme agama berimplikasi langsung pada kohesi sosial dan pertahanan ideologi bangsa.

Konsep pertahanan ideologi telah lama dibahas dalam studi strategis dan keamanan. Menurut Huntington, kekuatan pertahanan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas militer, melainkan juga oleh daya tahan ideologi yang menopang legitimasi politik negara (Huntington, 1957). Dalam konteks Indonesia, doktrin pertahanan negara semesta menekankan pentingnya menjaga Pancasila sebagai benteng ideologis melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 2002). Penelitian dari Aris Sarjito menambahkan bahwa ancaman ideologi pada era digital semakin kompleks karena penyebaran paham ekstrem dapat dengan mudah menembus ruang publik melalui media sosial dan jaringan global (Sarjito, 2024). Oleh karena itu, pertahanan ideologi memerlukan kombinasi strategi *hard power* dan *soft power* dengan basis SDM pertahanan yang berdaya tahan.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki posisi sentral dalam membangun ketahanan ideologi. Kaelan menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar filsafat negara, melainkan juga sumber nilai yang mempersatukan keragaman bangsa (Kaelan, 2015). Dalam konteks globalisasi, Pancasila berfungsi sebagai filter nilai yang menjaga identitas nasional dari penetrasi ideologi asing, baik fundamentalisme agama maupun liberalisme global (Latif, 2011). Studi internasional, seperti yang dilakukan oleh Tonnesson dan Antlov, menegaskan bahwa bangsa-bangsa Asia membutuhkan ideologi inklusif yang mampu menyeimbangkan tradisi lokal dan tuntutan modernitas untuk memperkuat pertahanan nasional (Tonnesson & Antlov, 2013). Dengan demikian, Pancasila dapat dipandang sebagai instrumen ideologis yang harus dijaga melalui pembangunan SDM pertahanan yang tangguh, resilien, dan adaptif terhadap dinamika global.

Peta Ancaman Ideologis terhadap Pertahanan Indonesia

Radikalisme agama merupakan ancaman serius bagi pertahanan ideologi Indonesia. Fenomena ini muncul dari pemahaman tekstual-ekstrem atas ajaran agama yang dipolitisasi untuk membenarkan kekerasan. Berbagai kelompok seperti Jamaah Islamiyah dan jaringan transnasional yang terhubung dengan ISIS menunjukkan bagaimana radikalisme dapat merusak kohesi sosial, memicu terorisme, dan mengancam keamanan nasional (Azra, 2016). Radikalisme tidak hanya menargetkan aspek fisik, tetapi juga memengaruhi dimensi ideologis dengan berupaya menggantikan Pancasila dengan sistem politik keagamaan tertentu.

Konservatisme agama, meski berbeda dari radikalisme, juga menghadirkan ancaman ideologis. Orientasi konservatif yang rigid terhadap tafsir agama kerap memunculkan resistensi terhadap nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan kebebasan beragama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konservatisme agama memperlemah narasi moderasi beragama yang menjadi basis Islam *wasathiyah* di Indonesia (Bruinessen, 2013). Konservatisme ekstrem dapat menghambat dialog lintas iman, memperbesar segregasi sosial, serta menumbuhkan intoleransi yang berujung pada konflik horizontal.

Liberalisme agama muncul sebagai tantangan berbeda dengan wajah yang lebih halus. Paham ini mengedepankan kebebasan individu dalam menafsirkan ajaran agama hingga melewati batas konsensus teologis umat. Meskipun membawa semangat kebebasan, liberalisme agama berpotensi menimbulkan fragmentasi pemahaman keagamaan dan melemahkan otoritas institusi keagamaan arus utama (Saeed, 2006). Dalam konteks pertahanan ideologi, liberalisme ekstrem dapat melahirkan relativisme nilai yang menantang peran Pancasila sebagai konsensus nasional.

Ancaman ideologis tidak lagi bersifat domestik, melainkan berjejaring secara transnasional. Globalisasi informasi memungkinkan penetrasi ideologi asing yang dapat merusak keutuhan bangsa. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa jaringan terorisme transnasional, pendanaan lintas negara, hingga propaganda digital internasional telah memperluas cakupan ancaman

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

(Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Tahun 2024, 2025). Indonesia menjadi target empuk karena statusnya sebagai negara demokratis dengan jumlah Muslim terbesar di dunia.

Radikalisme agama di Indonesia juga mengalami transformasi ke ruang digital. Penelitian Leonie Schmidt menunjukkan bahwa platform media sosial menjadi arena utama rekrutmen, propaganda, dan penyebaran narasi ideologis radikal (Schmidt, 2018). Dengan kemampuan algoritma yang memperkuat *echo chamber*, pengguna internet rentan terpapar konten radikal tanpa disadari. Hal ini menambah kompleksitas dalam menjaga ketahanan ideologis karena batas antara ruang privat dan publik semakin kabur.

Konservatisme agama menemukan momentum dalam arus politik identitas. Pemilu 2019 dan berbagai dinamika sosial-politik menunjukkan bagaimana isu agama dieksploitasi untuk kepentingan elektoral. Jika tidak dikelola dengan baik, konservatisme agama dapat bertransformasi menjadi gerakan politik eksklusif yang menantang asas kebangsaan (Qodir, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa ancaman ideologis tidak hanya berasal dari kekuatan luar, melainkan juga terinternalisasi dalam praktik politik domestik.

Sementara itu, liberalisme agama berimplikasi pada lahirnya resistensi terhadap otoritas keagamaan formal. Di satu sisi, hal ini mendorong kebebasan berpikir, tetapi di sisi lain berpotensi meruntuhkan kerangka nilai kolektif yang menopang bangsa. Fenomena ini tampak pada wacana pluralisme radikal yang menolak setiap klaim kebenaran absolut, sehingga sulit dijembatani dengan kerangka ideologi Pancasila yang membutuhkan kesepakatan normatif bersama (Madjid, 2019).

Ancaman ideologis transnasional juga muncul melalui *soft power*, termasuk budaya populer dan wacana global. Penetrasi ideologi liberal Barat dengan membawa isu hak asasi manusia, gender, dan orientasi seksual kerap berbenturan dengan nilai religius mayoritas di Indonesia. Ketidakmampuan mengelola ketegangan ini dapat menimbulkan disorientasi identitas, terutama di kalangan generasi muda (Carothers & O'Donohue, 2019). Oleh karena itu, ketahanan ideologi memerlukan pendekatan kritis yang mampu mengintegrasikan nilai global tanpa kehilangan akar lokal.

Dalam perspektif pertahanan nasional, ancaman ideologis ini bukan ancaman abstrak, tetapi nyata dan multidimensional. Jika dibiarkan, semuanya dapat mengikis fondasi ideologis negara, melemahkan legitimasi Pancasila, dan membuka jalan bagi konflik sosial yang lebih luas (Burhani, 2018).

Oleh sebab itu, pemetaan ancaman ideologis menjadi langkah strategis dalam menyusun kebijakan pertahanan nasional. Identifikasi yang akurat atas radikalisme, konservatisme, liberalisme, dan pengaruh transnasional akan menentukan efektivitas strategi penguatan ideologi Pancasila. Tanpa kesadaran kolektif mengenai kompleksitas ancaman ini, ketahanan nasional hanya akan bersifat parsial dan rapuh. Penelitian ini menegaskan bahwa ancaman ideologis merupakan bagian integral dari spektrum pertahanan yang harus ditangani dengan pendekatan multidisipliner (*Defence White Paper*, 2015).

Perbandingan Pendekatan Indonesia dan Negara-Negara Asia dalam Menghadapi Ekstremisme Ideologis

Berbagai negara di Asia mengembangkan pendekatan yang beragam dalam merespons ancaman ekstremisme dan ideologi keagamaan, dan pola ini memperlihatkan bagaimana strategi keamanan dan pendidikan ideologis dijalankan secara berbeda sesuai karakter politik masing-masing negara. Menurut Croissant & Lorenz, negara-negara Asia Timur cenderung menggabungkan kontrol negara, pendidikan kewarganegaraan, dan penguatan memori kolektif sebagai fondasi ketahanan ideologi (Croissant & Lorenz, 2018). Singapura, mengintegrasikan kurikulum *National Education* ke seluruh jenjang pendidikan, disertai program *Religious Rehabilitation Group* (RRG) yang memadukan kontrol negara dengan pendidikan teologi moderat (El-Said, 2015; Jayakumar, 2021). Model Singapura memperlihatkan bahwa stabilitas ideologi dibangun melalui sentralisasi kebijakan dan integrasi SDM pertahanan dimulai dari sekolah hingga angkatan bersenjata ke dalam strategi ketahanan nasional. Sedangkan Malaysia menempuh pendekatan *hybrid* yang memadukan *hard law* dan *soft law*, yaitu penegakan tegas melalui *Prevention of Terrorism Act* (POTA), serta pembinaan komunitas melalui *Countering Violent Extremism* (CVE) berbasis sosial-keagamaan

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

(Eugene, 2020). Pendekatan Malaysia menonjolkan hubungan negara dengan komunitas, namun tetap menempatkan aparat keamanan sebagai instrumen utama dalam memutus jejaring ekstremisme.

Di Asia Timur, Jepang menunjukkan pendekatan yang berbeda karena ancaman ideologisnya tidak berbasis agama melainkan kultus ekstrem seperti *Aum Shinrikyo*. Jepang merespons melalui penguatan rezim hukum, pengetatan pengawasan kelompok keagamaan, serta pendidikan kewargaan berbasis nilai konstitusi dan prinsip *pacifism* (Ushiyama, 2023). Meskipun konteksnya berbeda dari Indonesia, Jepang menunjukkan bahwa respons terhadap ekstremisme harus memadukan regulasi yang kuat dengan internalisasi nilai kebangsaan secara berjenjang.

Sementara itu, India menghadapi ekstremisme dalam bentuk yang lebih kompleks, termasuk radikalisme Hindu nasionalis dan jaringan Islam radikal di Kashmir. Strateginya memadukan penegakan hukum, pendidikan toleransi multikultural, dan diplomasi internal untuk menahan polarisasi sektarian (Singh, 2024). Pengalaman India menunjukkan bahwa ketika dinamika agama sangat beragam, negara harus memperkuat kapasitas institusi pertahanan dan kepolisian sekaligus membangun jejaring sosial-lintas-etnis guna mencegah konflik ideologis.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia pada dasarnya telah mengembangkan pendekatan *soft power* yang kuat melalui BNPT, Kementerian Agama, BPIP, serta sinergi dengan ormas moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun, respons Indonesia masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya menempatkan SDM pertahanan sebagai simpul utama dalam strategi ideologi negara (Sarjito, 2025). Pendidikan kewarganegaraan dan moderasi beragama memang berkembang luas, tetapi belum menjadi bagian integral dari kebijakan pertahanan nasional yang secara langsung melibatkan TNI, elemen cadangan, komponen pendukung, maupun aparatur birokrasi pertahanan (Kusuma et al., 2024). Dibandingkan dengan Singapura, Indonesia tertinggal dalam integrasi ideologi ke dalam pendidikan pertahanan; dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia relatif lebih kuat di masyarakat sipil tetapi lebih lemah dalam koordinasi negara; dibandingkan dengan Jepang, Indonesia memiliki fleksibilitas sosial tetapi kurang dalam konsistensi kerangka hukum; sedangkan dibandingkan India, Indonesia unggul dalam penanganan dialog antaragama tetapi masih menghadapi kerentanan polarisasi.

Peningkatan peran SDM pertahanan dalam menghadapi ancaman radikalisme, konservatisme, dan liberalisme agama harus diposisikan sebagai strategi ideologis negara, bukan hanya kebijakan keamanan. Perbandingan dengan negara-negara Asia menunjukkan bahwa ketahanan ideologi hanya dapat terbentuk apabila SDM pertahanan menjadi katalis internalisasi nilai kebangsaan, pengelola narasi digital, dan aktor integratif yang menghubungkan pendidikan, birokrasi, dan keamanan nasional. Indonesia perlu bergerak dari pendekatan yang tersebar menuju model integratif yang memusatkan pembinaan ideologi pada SDM pertahanan sebagai garda utama pertahanan non-militer negara.

Peran Strategis SDM Pertahanan dalam Menjawab Ancaman Ideologi

Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ideologi bangsa. SDM pertahanan tidak hanya mencakup militer, tetapi juga aparat sipil, akademisi, dan masyarakat yang terlibat dalam upaya mempertahankan Pancasila. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas SDM berarti menyiapkan aktor-aktor yang mampu memahami, mendeteksi, dan merespons ancaman ideologis dengan tepat.

TNI dan POLRI sebagai garda terdepan pertahanan dan keamanan negara memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi ancaman ideologi. Melalui operasi militer selain perang (OMSP), TNI terlibat aktif dalam program deradikalisasi, kontra-propaganda, dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah rawan konflik (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Doktrin Pertahanan Negara, 2014). Peran POLRI, khususnya Densus 88, terbukti krusial dalam menanggulangi jaringan terorisme yang berbasis ideologi radikal (Chalmers, 2017; Sumpter, 2017).

SDM birokrasi pertahanan juga memiliki signifikansi tinggi. Aparatur di Kementerian Pertahanan, BNPT, dan lembaga terkait harus memiliki kompetensi dalam merancang kebijakan yang berbasis riset, termasuk strategi kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Kompetensi kebijakan ini penting agar program yang dirumuskan tidak sekadar retorika, melainkan

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

efektif menekan penyebaran ideologi yang mengancam Pancasila (Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024, 2021).

Akademisi dan peneliti berperan dalam membangun kerangka konseptual menghadapi ancaman ideologi. Melalui kajian interdisipliner, mereka dapat menjelaskan dinamika radikalisme, konservatisme, dan liberalisme agama secara lebih ilmiah. Penelitian berbasis bukti (*evidence-based policy*) dapat membantu pemerintah merancang strategi ketahanan ideologi yang lebih tepat sasaran (Hasan, 2010).

Peran masyarakat sipil juga tidak dapat diabaikan. Organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal menjadi aktor utama dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Program moderasi beragama yang dijalankan oleh Kementerian Agama, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama menunjukkan betapa masyarakat sipil memiliki kontribusi strategis dalam meredam ideologi ekstrem (Aryani et al., 2024).

SDM di sektor pendidikan merupakan benteng jangka panjang bagi pertahanan ideologi. Guru, dosen, dan tenaga pendidik harus dibekali dengan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat nilai kebangsaan dan toleransi. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan nilai Pancasila mampu memperkuat ketahanan ideologi di kalangan generasi muda (Pangalila & Fatimah, 2023).

Selain itu, SDM pertahanan di ranah digital semakin krusial. Kehadiran *cyber troops*, analis data, dan pakar IT diperlukan untuk melawan propaganda radikal yang tersebar di media sosial. Strategi kontra-narasi di ruang digital harus dikelola secara profesional agar dapat bersaing dengan narasi radikal yang kerap lebih masif dan kreatif.(Montasari, 2024)

Kolaborasi antar-SDM pertahanan juga menjadi kunci. TNI, POLRI, birokrasi, akademisi, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam satu ekosistem pertahanan ideologi. Kolaborasi ini mencerminkan prinsip *whole of nation approach*, di mana seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga ideologi negara (*Defence White Paper*, 2015).

Namun, masih terdapat kesenjangan kapasitas di kalangan SDM pertahanan. Kurangnya koordinasi antar-lembaga, minimnya literasi digital, dan lemahnya integrasi kurikulum Pancasila menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, reformasi birokrasi, dan revitalisasi pendidikan ideologi (Idris, 2018).

Penguatan Ideologi Pancasila sebagai Basis Ketahanan Nasional

Penguatan ideologi Pancasila merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai filter ideologis terhadap pengaruh radikalisme, konservatisme, liberalisme agama, dan ideologi transnasional (*Defence White Paper*, 2015). Dalam konteks pertahanan, Pancasila diposisikan sebagai benteng yang menjaga agar bangsa tidak terpecah oleh tarik-menarik kepentingan ideologis global.

Pendidikan ideologi menjadi instrumen pertama yang paling strategis. Kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi telah memasukkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Namun, implementasinya sering bersifat formalistik dan belum menyentuh ranah praksis (Fitriasari et al., 2020; Sari et al., 2023). Studi Arief Rahman dan Irma Irayanti menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila yang diintegrasikan dengan nilai demokrasi dan pluralisme mampu memperkuat daya tahan generasi muda terhadap paham ekstremisme (Rahman & Irayanti, 2025).

Selain pendidikan, kaderisasi ideologis di lembaga-lembaga negara juga sangat penting. Program bela negara yang dijalankan Kementerian Pertahanan sejak 2015 berupaya menanamkan cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan kesiapan membela negara. Evaluasi terbaru menunjukkan bahwa program ini berhasil membangun solidaritas nasional, meski masih menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan dan persepsi publik (Prakoso, 2021).

Regulasi dan kebijakan negara juga memainkan peran sentral dalam penguatan Pancasila. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional menegaskan pentingnya penguatan ideologi

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

melalui bela negara sebagai bagian dari pertahanan semesta (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, 2019). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pertahanan ideologi tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI, tetapi seluruh warga negara.

Peran lembaga khusus seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) semakin vital dalam merumuskan strategi dan narasi penguatan Pancasila. BPIP secara aktif melakukan kampanye digital, pelatihan, serta pembinaan ASN dan generasi muda. Meskipun menuai kritik karena dianggap belum menyentuh akar masalah intoleransi, BPIP tetap menjadi instrumen kelembagaan penting dalam menjaga aktualisasi Pancasila di ruang publik (Laporan Capaian Program Dan Kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024, 2025).

Penguatan ideologi Pancasila juga harus menyentuh ranah kebudayaan. Menurut Yudi Latif, Pancasila bukan sekadar doktrin politik, melainkan juga kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang hidup dalam masyarakat (Latif, 2011). Sinergi antara negara dan masyarakat sipil juga menjadi elemen penting. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memainkan peran strategis dalam mengarusutamakan moderasi beragama yang sejalan dengan Pancasila. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa penguatan ideologi bukan hanya agenda negara, tetapi juga misi sosial keagamaan (Fitri et al., 2025).

Namun, penguatan Pancasila masih menghadapi kesenjangan implementasi. Banyak program yang berhenti pada level seremonial tanpa menumbuhkan internalisasi nilai. Burhani menekankan bahwa strategi penguatan ideologi harus berbasis pada pendekatan diskursif-transformatif, yakni menghubungkan nilai Pancasila dengan tantangan nyata seperti krisis iklim, korupsi, dan ketidakadilan sosial (Burhani, 2018).

Strategi Integratif dalam Menghadapi Tantangan Global dan Digital

Era globalisasi dan revolusi digital menghadirkan tantangan multidimensional terhadap pertahanan ideologi Indonesia. Arus informasi yang cepat, penetrasi budaya global, dan ekspansi ideologi transnasional menuntut adanya strategi integratif dalam menjaga Pancasila. Strategi ini harus menggabungkan aspek militer, politik, pendidikan, budaya, dan teknologi agar pertahanan ideologi tetap relevan di tengah dinamika global (*Defence White Paper*, 2015)

Pertama, pendekatan dekolonial perlu diterapkan dalam menghadapi dominasi wacana global. Dekolonialitas menekankan pentingnya membangun epistemologi non-Barat yang berakar pada nilai lokal dan Pancasila. Menurut Walter Mignolo, dekolonialitas adalah upaya merebut kembali ruang pengetahuan dari hegemoni modernitas Barat (Mignolo, 2011). Bagi Indonesia, hal ini berarti menguatkan Pancasila sebagai kerangka epistemik alternatif dalam menjawab isu global seperti demokrasi, HAM, dan pluralisme.

Kedua, penguatan literasi digital merupakan prioritas utama. Generasi muda sebagai pengguna utama media sosial sangat rentan terhadap disinformasi, hoaks, dan propaganda radikal. Penelitian Adhayanto menunjukkan bahwa literasi digital yang dipadukan dengan penguatan nilai Pancasila dapat menjadi benteng ideologis yang efektif (Adhayanto et al., 2021). Tanpa literasi digital, ancaman ideologi akan semakin sulit dikendalikan.

Ketiga, strategi kontra-narasi di ruang maya harus diperkuat. BNPT bersama masyarakat sipil telah menginisiasi program duta damai dunia maya yang terbukti efektif dalam melawan narasi radikal secara kreatif (Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Tahun 2024, 2025). Namun, masih diperlukan konsistensi, dukungan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor agar pesan kebangsaan mampu bersaing dengan narasi ekstremis yang lebih masif.

Keempat, diplomasi pertahanan juga menjadi bagian dari strategi integratif. Indonesia perlu berperan aktif dalam kerja sama internasional, baik melalui ASEAN maupun PBB, untuk menekan penyebaran ideologi radikal transnasional. Menurut Ralf Emmers, kerja sama pertahanan regional sangat efektif dalam membangun stabilitas keamanan dan mencegah infiltrasi ideologi berbahaya (Emmers, 2004)

Kelima, strategi integratif menuntut kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup, melainkan harus dikombinasikan dengan pemberdayaan masyarakat, pendidikan kewarganegaraan, dan penguatan

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

organisasi keagamaan moderat (Hamayotsu, 2013). Dengan cara ini, penguatan Pancasila menjadi gerakan nasional, bukan sekadar agenda birokrasi.

Keenam, integrasi teknologi pertahanan juga perlu dilakukan. Revolusi industri 4.0 telah membuka ruang baru bagi perang ideologis melalui *cyber warfare* dan *information warfare*. TNI dan lembaga pertahanan harus memperkuat kapasitas siber nasional agar mampu mendeteksi, merespons, dan melumpuhkan ancaman ideologis yang beroperasi secara digital (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2021).

Ketujuh, penguatan ekonomi berbasis keadilan sosial juga penting untuk menopang pertahanan ideologi. Ketimpangan sosial-ekonomi menjadi salah satu pemicu utama tumbuhnya radikalisme. Yudi Latif menegaskan bahwa Pancasila hanya dapat bertahan jika diwujudkan dalam keadilan sosial yang konkret (Latif, 2011). Oleh karena itu, strategi ideologis harus bersinergi dengan kebijakan pembangunan inklusif.

Kedelapan, integrasi pendidikan formal dan non-formal menjadi krusial. Pendidikan formal menanamkan nilai Pancasila secara kurikuler, sementara pendidikan non-formal melalui keluarga, komunitas, dan organisasi sosial menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Tilaar, 2003). Dengan pendekatan ini, ideologi Pancasila tidak berhenti sebagai teori, tetapi hidup dalam praktik masyarakat.

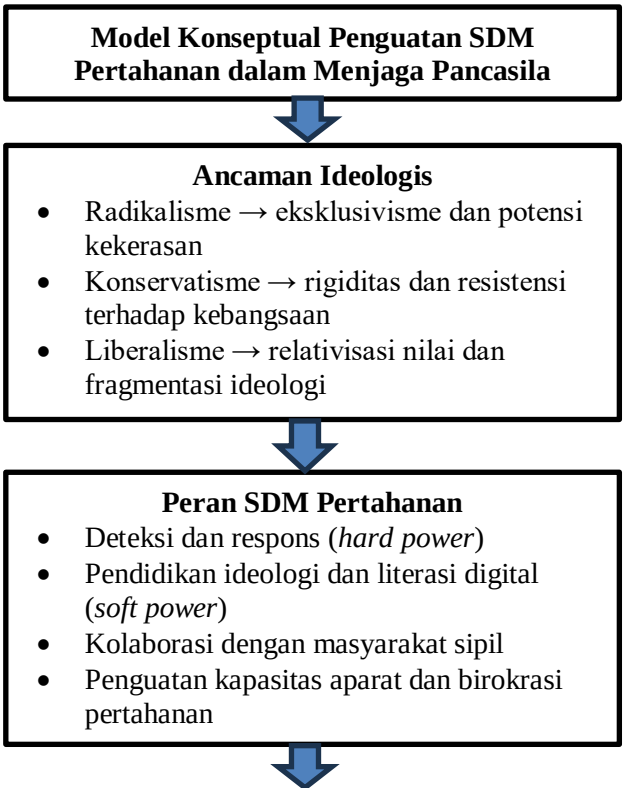
Kesembilan, strategi integratif harus bersifat adaptif terhadap dinamika global. Hal ini berarti negara perlu mengantisipasi tren baru seperti *artificial intelligence*, *big data*, dan ruang digital terdesentralisasi (Web3) yang juga dapat menjadi medium penyebaran ideologi ekstrem (Floridi, 2013). Adaptasi ini menuntut kolaborasi lintas disiplin antara ahli teknologi, ilmuwan sosial, dan pembuat kebijakan.

Model Konseptual Penguatan SDM Pertahanan dalam Menjaga Pancasila

Model konseptual ini menjelaskan keterkaitan antara ancaman ideologis keagamaan, peran SDM pertahanan, dan strategi penguatan Pancasila. Ancaman ideologis hadir melalui tiga spektrum utama, yaitu radikalisme, konservatisme, dan liberalisme agama yang masing-masing membawa dampak berbeda terhadap stabilitas nasional. Dalam kerangka pertahanan semesta, SDM pertahanan menjadi aktor kunci yang menghubungkan ancaman tersebut dengan respons negara. SDM tersebut tidak hanya mencakup komponen militer, tetapi juga aparatur Kementerian Pertahanan, komponen cadangan, lembaga pendidikan pertahanan, dan aktor sipil. Peran mereka dijalankan melalui kombinasi *hard power*, berupa deteksi, penindakan, dan mitigasi ancaman kekerasan dan *soft power*, berupa pendidikan ideologi, literasi digital, kontra-narasi, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil. Integrasi kedua pendekatan ini memastikan bahwa respons terhadap ancaman ideologis tidak hanya reaktif, tetapi membangun ketahanan ideologi jangka panjang.

Strategi penguatan Pancasila berfungsi sebagai upaya sistematis untuk menjaga ideologi negara dari tekanan eksternal maupun internal. Strategi ini mencakup pendidikan ideologi yang terintegrasi, sinergi negara dengan masyarakat sipil, diplomasi pertahanan, kerja sama regional, serta penguatan ketahanan digital dan keadilan sosial. Pancasila perlu ditempatkan bukan hanya sebagai nilai normatif, tetapi sebagai kerangka operasional yang dibangun melalui kebijakan, tindakan sosial, dan kesiapan SDM pertahanan.

Relasi antara ketiga *variable* tersebut dapat diringkas dalam satu alur logis sebagai berikut.



Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan



KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman ideologis keagamaan di Indonesia hadir dalam tiga spektrum utama, yaitu radikalisme, konservatisme, dan liberalisme agama yang masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap stabilitas ideologi Pancasila. Ketiganya bekerja melalui narasi, ruang digital, jaringan sosial, dan institusi keagamaan sehingga memengaruhi ketahanan ideologi nasional. Temuan ini menegaskan bahwa respons pertahanan terhadap ancaman ideologis tidak dapat bersifat parsial, tetapi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif.

Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa SDM pertahanan memegang peran strategis sebagai penghubung antara pemetaan ancaman dan implementasi strategi penguatan ideologi negara. SDM pertahanan, baik militer maupun sipil, harus memiliki kecakapan *hard power* untuk mendeteksi dan merespons potensi kekerasan, namun juga kompetensi *soft power* dalam pendidikan ideologi, literasi digital, produksi kontra-narasi, serta pembinaan masyarakat. Pertahanan nasional yang bersifat semesta mensyaratkan bahwa penguatan SDM pertahanan tidak hanya menyasar TNI, tetapi juga aparatur Kemhan, komponen cadangan, komponen pendukung, serta lembaga pendidikan pertahanan yang harus menginternalisasikan Pancasila secara sistemik dan berkelanjutan.

Berdasarkan implikasi tersebut, rekomendasi kebijakan yang lebih konkret dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. *Pertama*, Kemhan bersama BPIP perlu mengintegrasikan kurikulum Pancasila–pertahanan di seluruh lembaga pendidikan pertahanan, termasuk Universitas Pertahanan, Pusdiklat Kemhan, dan lembaga diklat TNI. *Kedua*, BNPT dan TNI perlu melakukan standardisasi pelatihan literasi digital bagi prajurit, ASN pertahanan, dan unsur komponen pendukung untuk memperkuat kemampuan deteksi dini serta kontra-narasi terhadap ekstremisme keagamaan di ruang digital. *Ketiga*, dibutuhkan skema kolaborasi formal antara Kemhan–BPIP–Kemenag–ormas keagamaan moderat (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya) untuk menyelaraskan program moderasi beragama, bela negara, dan pendidikan kebangsaan dalam kerangka pertahanan ideologis nasional. *Keempat*, diplomasi pertahanan dan kerja sama regional perlu diperkuat untuk mengantisipasi arus ideologi transnasional yang sering bergerak melintasi batas negara melalui jalur digital.

Adapun agenda riset lanjutan dapat diarahkan pada tiga fokus utama. *Pertama*, penelitian empiris mengenai efektivitas program pendidikan ideologi di lembaga pertahanan untuk mengukur sejauh mana internalisasi Pancasila bekerja dalam praktik. *Kedua*, riset mendalam terkait pola adaptasi ekstremisme keagamaan di ruang digital, termasuk pemanfaatan AI dan *platform* media sosial baru yang digunakan kelompok radikal. *Ketiga*, pengembangan model evaluasi kebijakan yang mengukur kemampuan SDM pertahanan dalam menjalankan fungsi ideologis, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan standar kompetensi nasional di bidang pertahanan non-militer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkuat fondasi teoritis terkait peran SDM pertahanan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pertahanan yang responsif terhadap dinamika ideologis masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Adhayanto, O., Nazaki, N., Rahmawati, N., Haryanti, D., Suwardi, N., & Pambudi, R. (2021). The Strategy of Strengthening Pancasila Ideology In The Digital Age. *Pancasila and Law Review*, *2*(2), 99–108. https://doi.org/10.25041/plr.v2i2.2396

Aryani, S. A., Wiranto, E. B., Asroni, A., Waston, Fauziyah, S., & Yusup, M. (2024). Synergy

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

of the Ministry of Religious Affairs, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah in Driving Religious Moderation to Achieve Indonesia's SDGs Targets. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *25*(02), 433–454. https://doi.org/10.23917/profetika.v25i02.8536

Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Kencana.

Booth, K. (2007). *Theory of World Security*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511840210

Bourchier, D. M. (2019). Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, *49*(5), 713–733. https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620

Bruinessen, M. van. (2013). Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the "Conservative Turn" of the Early Twenty-first Century. In M. van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn."* Institute of Southeast Asian Studies.

Burhani, A. N. (2018). Pluralism, Liberalism, and Islamism: Religious Outlook of Muhammadiyah. *Studia Islamika*, *25*(3), 433–470. https://doi.org/10.15408/sdi.v25i3.7765

Carothers, T., & O'Donohue, A. (2019). *Democracies Divided: The Global Challenge of Political Polarization*. Brookings Institution Press.

Chalmers, I. (2017). Countering Violent Extremism in Indonesia: Bringing Back the Jihadists. *Asian Studies Review*, *41*(3), 331–351. https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1323848

Croissant, A., & Lorenz, P. (2018). *Comparative Politics of Southeast Asia: An Introduction to Governments and Political Regimes*. Springer.

Defence White Paper (Third edition). (2015). Defence Ministry of the Republic of Indonesia.

El-Said, H. (2015). Singapore: Crisis of Identity, Shared Values, And Religious Rehabilitation. In *New Approaches to Countering Terrorism: Designing and Evaluating Counter Radicalization and De-Radicalization Programs* (pp. 138–173). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137449979_6

Emmers, R. (2004). *Non-traditional Security in the Asia-Pacific: The Dynamics of Securitisation*. Eastern Universities Press.

Eugene, T. K. B. (2020). Defeating the Scourge of Terrorism: How Soft Law Instruments in Singapore Can Develop Societal Trust and Promote Cooperative Norms. *Interreligious Relations*, *20*, 1–22. https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/3467

Fitri, A. B. M., Barizi, A., Izzuddin, A., Miftahuddin, A. H., & Huda, A. (2025). The Politics and Practice of Religious Moderation in Indonesia: A Study of the Ministry of Religious Affairs, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, *19*(2), 321–347. https://doi.org/10.15642/islamica.2025.19.2.321-347

Fitriasari, S., Masyitoh, I. S., & Baeihaqi. (2020). *The Role of Pancasila Education Teachers and Citizenship in Strengthening Character Education Based on Pancasila Values*. 534–540. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.101

Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford University Press.

Hamayotsu, K. (2013). The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance. *Journal of Contemporary Asia*, *43*(4), 658–677. https://doi.org/10.1080/00472336.2013.780471

Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. SEAP Publications.

Hasan, N. (2010). The Failure of the Wahhabi Campaign: Transnational Islam and the Salafi Madrasa in Post-9/11 Indonesia. *South East Asia Research*, *18*(4), 675–705. https://doi.org/10.5367/sear.2010.0015

Huntington, S. P. (1957). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations*. Harvard University Press.

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

Idris, I. (2018). *DERADIKALISASI: Kebijakan, Strategi Dan Program Penanggulangan Terorisme*. Penerbit Cahaya Insani.

Jayakumar, S. (2021). Research Note: Singapore's "Deradicalisation" Model: Revolution – or Evolutions? *Journal for Deradicalization*, *26*, 227–246. https://jd.journals.publicknowledgeproject.org/jd/index.php/jd/article/view/443

Kaelan. (2015). *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Paradigma.

Kurzman, C., & Kurzman, C. (Eds.). (1998). Liberal Islam and Its Islamic Context. In *Liberal Islam: A Source Book*. Oxford University Press.

Kusuma, K., Hermanto, D., Rudiawan, B., Amiruddin, M., Sumarna, S., Bhakti, D. C., Saragih, H., Rimbawa, A. D., Novian, Y. C., Deksino, G. R., Sudaryanto, H., Zaini, A., Ikhsanudin, A. H., Affandi, L. A., & Wilopo, W. (2024). *Manajemen Bela Negara: Konsep dan Tata Kelola Bela Negara Menuju Indonesia Emas*. Indonesia Emas Group.

Laporan Capaian Program dan Kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024. (2025). Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. https://bpip.go.id/assets/file/pengumuman/2025/07/03/eNvnDJIH9FBeNzZfF0Vp6PYCmBtvwDXTVaRVgiq2.pdf#page=10.10

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Tahun 2024. (2025). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. https://ppid.bnpt.go.id/storage/berkas/laporan-kinerja-bnpt-tahun-2024-48DETT.pdf

Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Madjid, N. (2019). *Islam: Doktrin & Peradaban*. Gramedia pustaka utama.

Mignolo, W. D. (2011). *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*. Duke University Press.

Montasari, R. (2024). Introduction. In R. Montasari (Ed.), *Cyberspace, Cyberterrorism and the International Security in the Fourth Industrial Revolution: Threats, Assessment and Responses* (pp. 1–15). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50454-9_1

Pangalila, T., & Fatimah, S. (2023). The Influence of Civic Education Learning and the Pancasila Student Profile Program on Improving Ideological Values Understanding. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *20*(2), 359–369. https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.61511

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (2021). https://peraturan.go.id/id/peraturan-bnpt-no-5-tahun-2021

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 Tentang Kontra Radikalisasi (2025). https://peraturan.go.id/id/peraturan-bnpt-no-1-tahun-2025

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (2021). https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/2022/08/JAKGARA-HANNEG-2020-2024.pdf

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Doktrin Pertahanan Negara (2014). https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/252014.pdf

Prakoso, L. Y. (2021). *Defense Policy Analysis to Deal with Radicalism and Terrorism in Indonesian Universities* (SSRN Scholarly Paper No. 3806504). Social Science Research Network. https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.265

Qodir, Z. (2025). Conservative Turn and Political Identity: Challenges to Democracy in Indonesia After Presidential Election 2019. *Identities*, *32*(3), 370–387. https://doi.org/10.1080/1070289X.2024.2415220

Rahman, A., & Irayanti, I. (2025). The Pancasila Deliberation Model: A Framework for

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

Fostering Democratic Citizenship in Civic Education. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, *7*(1), 41–58. https://doi.org/10.19105/ejpis.v7i1.18530

Saeed, A. (2006). *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge.

Sari, F. F. K., Sukarno, & Murwaningsih, T. (2023). The New Paradigm of Merdeka Curriculum: Implementation of Pancasila Education Subject in Elementary School. *International Journal of Elementary Education*, *7*(1), 79–88. https://doi.org/10.23887/ijee.v7i1.54092

Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, *6*(2), 175–186. https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547

Sarjito, A. (2025). Evaluating Indonesia's National Defense Policy in Shaping an Effective Area Denial Strategy. *Journal of Political Issues*, *6*(2), 124–134. https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.216

Schmidt, L. (2018). Cyberwarriors and Counterstars: Contesting Religious Radicalism and Violence on Indonesian Social Media. *Asiascape: Digital Asia*, *5*(1–2), 32–67. https://doi.org/10.1163/22142312-12340088

Singh, A. (2024). Hindu-Muslim Conflict in India: Causes, Consequences & Resolution. *International Journal of Social Science Research & Review*, *7*(10), 62–79. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i10.2273

Sterkens, C., & Hadiwitanto, H. (2016). Empirical Models of the Relationship between Religion and State in Indonesia: How Religious Beliefs Define the Relation between Religion and State. In *Freedom of Religion in the 21st Century* (pp. 162–206). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004304390_009

Subagyo, A. (2015). Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, *5*(3), 1–20. https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i3.367

Sumpter, C. (2017). Countering violent extremism in Indonesia: Priorities, practice and the role of civil society. *Journal for Deradicalization*, *11*, 112–147. https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/103

Tilaar, H. A. R. (2003). *Kekuasaan Dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural*. IndonesiaTera.

Tonnesson, S., & Antlov, H. (2013). Asia in Theories of Nationalism and National Identity. In *Asian Forms of the Nation* (pp. 1–40). Curzon Press.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (2002). https://peraturan.go.id/id/uu-no-3-tahun-2002

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (2019). https://peraturan.go.id/files/uu23-2019bt.pdf

Ushiyama, R. (2023). *Aum Shinrikyo and Religious Terrorism in Japanese Collective Memory*. Oxford University Press. https://doi.org/10.5871/bacad/9780197267370.001.0001

Yosarie, I., & Hasan, H. (2025). *Indeks Kota Toleran Tahun 2024* (S. Insiyah, Ed.). Pustaka Masyarakat Setara. https://setara-institute.org/ebook-indeks-kota-toleran-2024/

Copyright © 2025 Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan